

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

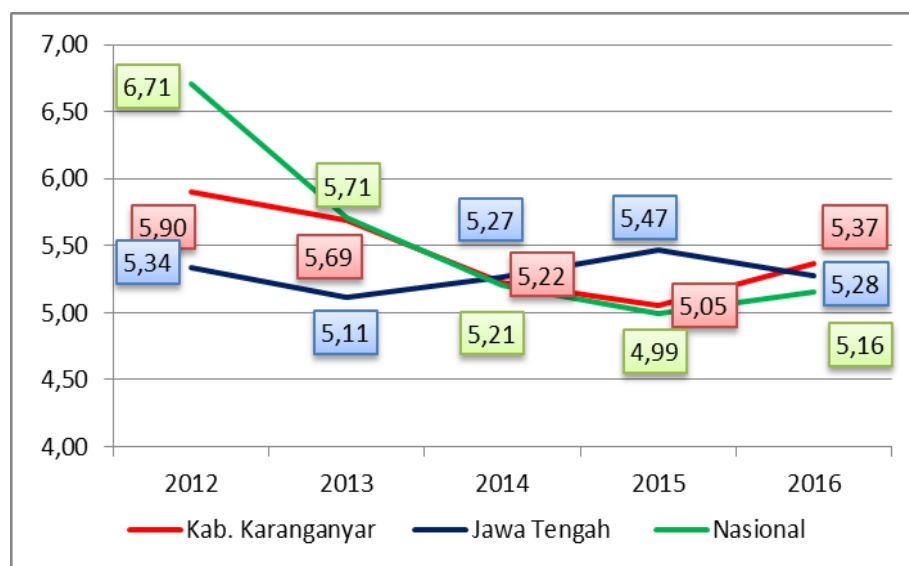
3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Karanganyar antara lain diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur wilayah dan pengembangan iptek, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, melalui pengembangan sektor investasi, pertanian dan maritim, industri pengolahan serta peningkatan belanja infrastruktur pemerintah, untuk memacu percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal lain yang perlu untuk dicermati adalah terkait kebijakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang berpengaruh dan berimbas langsung pada kondisi perekonomian di Kabupaten, sehingga diperlukan upaya sinergitas kebijakan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sekitarnya.

Ada beberapa indikator makro yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah Pertumbuhan ekonomi, PDRB, Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Inflasi, Pendapatan per kapita, dan lain-lain.

1. Pertumbuhan Ekonomi

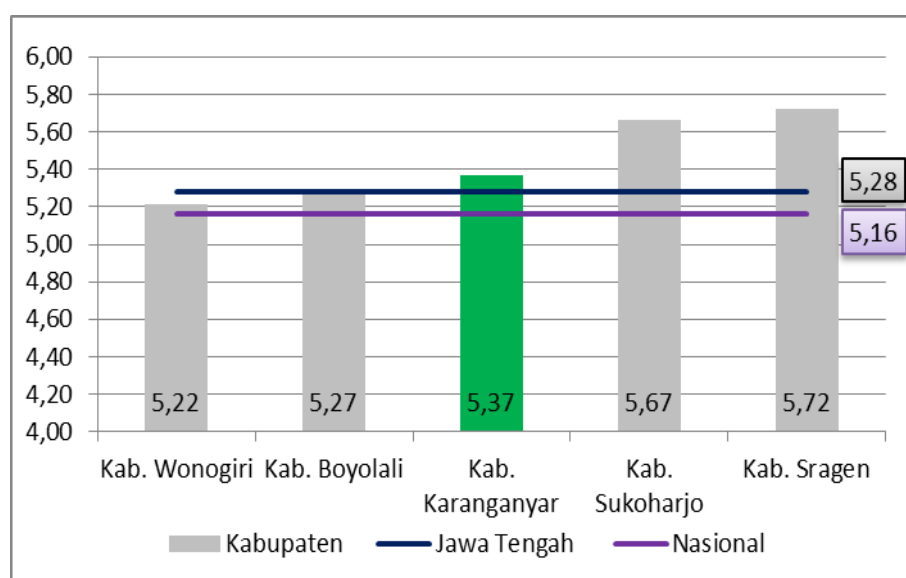
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2012 hingga 2016 terjadi fluktuasi, yaitu pada tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami penurunan dari 5,90% menjadi 5,05%, namun pada tahun 2016 menjadi sebesar 5,37%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar relevan dengan Nasional yang terus menurun, berbeda dengan capaian Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kenaikan pada periode tahun yang sama. Secara rinci bisa dilihat pada Gambar 3.1.



Sumber data : buku produk domestik regional bruto kabupaten kota di Indonesia 2012-2016

Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)

Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar sebesar 5,37% berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah (5,28%) dan nasional (5,16%). Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten sekitar di Jawa Tengah pada tahun 2016, Kabupaten Karanganyar berada pada posisi ke tiga tertinggi setelah Kabupaten Sragen dan Sukoharjo, seperti terlihat pada gambar 3.2.



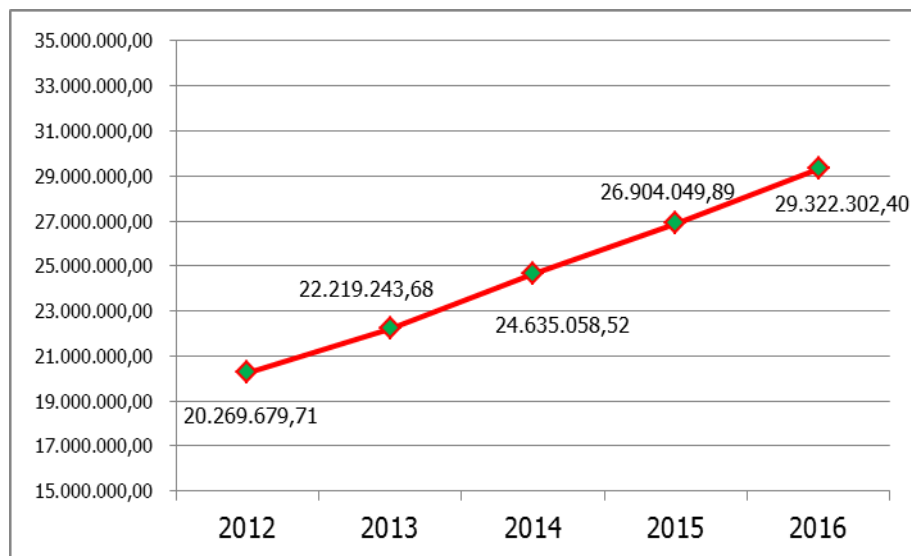
Sumber data : buku produk domestik regional bruto kabupaten kota di Indonesia 2012-2016

Gambar 3.2 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 (%)

2. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

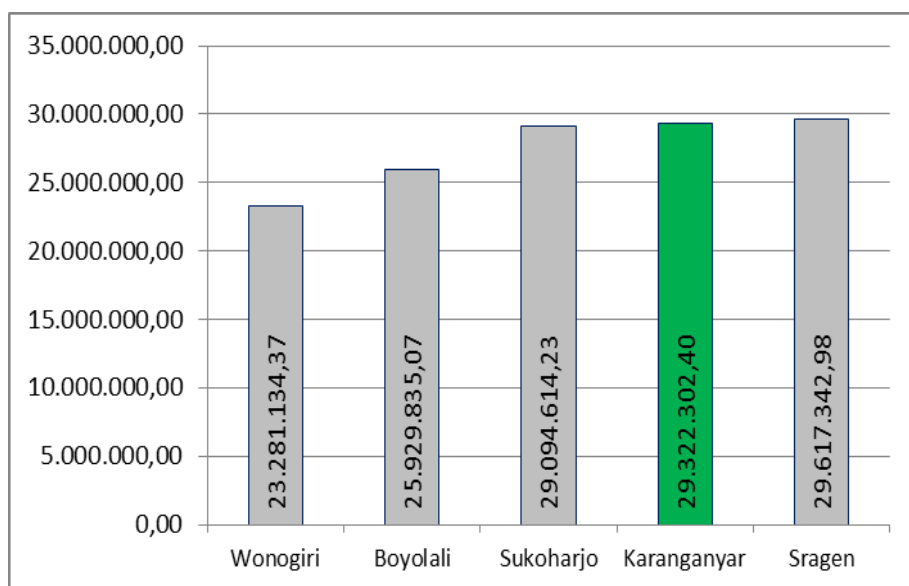
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 20.269.679,71 Juta terus meningkat hingga tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 29.322.302,40 Juta. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.3.



Sumber: BPS, Kabupaten Karanganyar 2017

Gambar 3.3 Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Posisi relatif capaian PDRB ADHB Kabupaten Karanganyar tahun 2016 dengan capaian Rp. 29.322.302,40,- Juta berada di posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Sragen sebesar Rp. 29.617.342,98,- Juta. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.4.

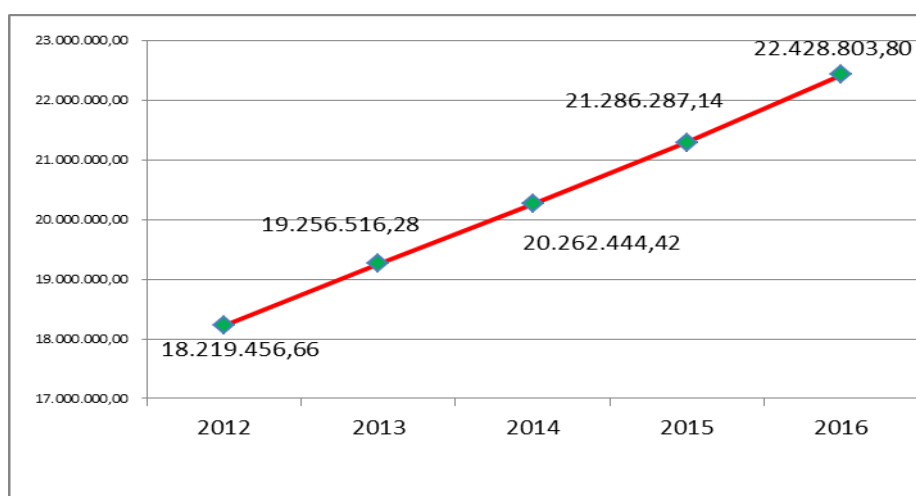


Sumber: BPS, Kabupaten Karanganyar 2017

Gambar 3.4 Posisi Relatif PDRB ADHB Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 (Juta Rupiah)

Sektor penyumbang terbesar PDRB ADHB di Kabupaten Karanganyar didominasi oleh tiga sektor, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi tertinggi pada sektor industri pengolahan yang mencapai Rp.13.424.883,79,- juta. Selengkapnya PDRB ADHB menurut lapangan usaha Kabupaten karanganyar tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Karanganyar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 18.219.456,66 juta terus meningkat hingga tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 22.428.803,80 juta, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.5.



Sumber: BPS, Kabupaten Karanganyar 2017

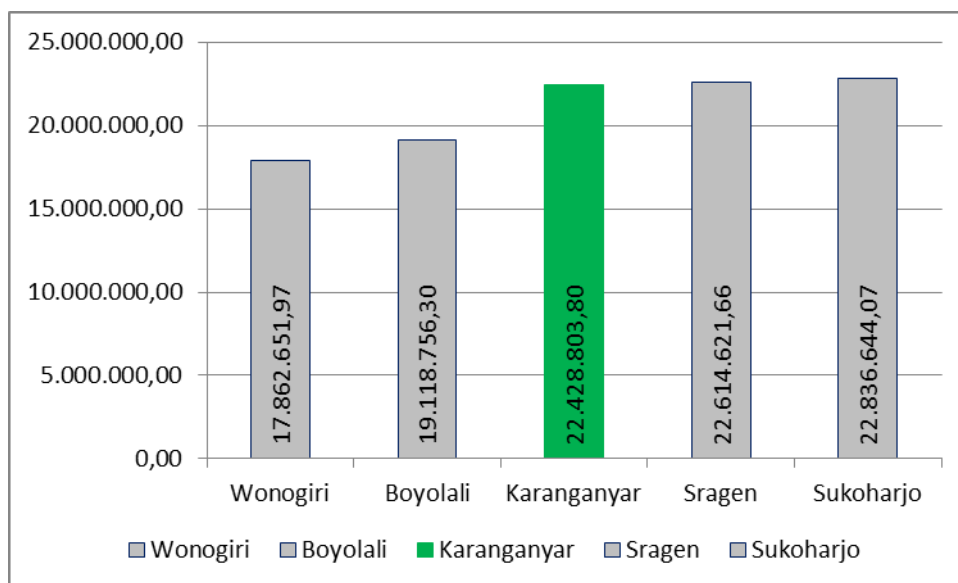
Gambar 3.5 Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	2.945.008,37	3.295.635,55	3.576.257,85	4.004.740,67	4.194.685,10
B	Pertambangan dan Penggalian	233.325,61	251.671,01	292.753,83	338.753,25	363.211,52
C	Industri Pengolahan	9.197.472,57	10.011.114,04	11.241.257,13	12.162.873,85	13.424.883,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas	31.937,89	33.229,61	35.770,42	38.129,52	43.424,68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16.327,72	17.006,43	17.823,63	18.546,54	19.633,91
F	Konstruksi	1.267.692,56	1.388.559,53	1.560.783,92	1.713.720,11	1.874.826,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.384.885,38	2.589.387,04	2.743.954,18	2.985.502,98	3.243.702,22
H	Transportasi dan Pergudangan	496.472,00	545.051,03	622.539,67	686.830,04	728.575,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	663.326,01	703.123,61	797.260,18	880.122,00	976.571,88
J	Informasi dan Komunikasi	240.162,72	253.315,93	271.522,40	286.415,07	307.229,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	715.389,33	773.870,74	830.589,64	918.608,72	1.017.618,15
L	Real Estat	347.582,55	374.459,58	424.736,83	467.975,03	502.011,15
M,N	Jasa Perusahaan	57.863,62	68.889,38	77.648,25	88.676,05	100.323,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	473.567,49	507.633,53	529.338,06	566.328,58	609.019,09
P	Jasa Pendidikan	782.829,92	935.665,72	1.064.114,95	1.148.730,96	1.260.687,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148.990,76	168.138,30	196.681,35	219.392,87	239.132,80
R,S, T, U	Jasa Lainnya	266.845,23	302.492,64	352.026,23	378.703,65	416.766,31
PDRB ADHB		20.269.679,71	22.219.243,68	24.635.058,52	26.904.049,89	29.322.302,40

Sumber: BPS, Kabupaten Karanganyar 2017

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitar PDRB ADHK Kabupaten Karanganyar pada tahun 2016 dengan capaian Rp. 22.428.803,80 juta menempati posisi ke-3 terendah setelah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.6.



Sumber: BPS, Kabupaten Karanganyar 2017

Gambar 3.6 Posisi Relatif PDRB ADHK Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 (Milliar Rupiah)

Sama halnya dengan kondisi PDRB ADHB, PDRB ADHK menurut lapangan usaha di Kabupaten Karanganyar juga didominasi oleh 3 sektor, yaitu yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Perkembangan kontribusi per lapangan usaha, PDR ADHK Kabupaten Karanganyar tahun 2012 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.2.

3. PDRB Perkapita

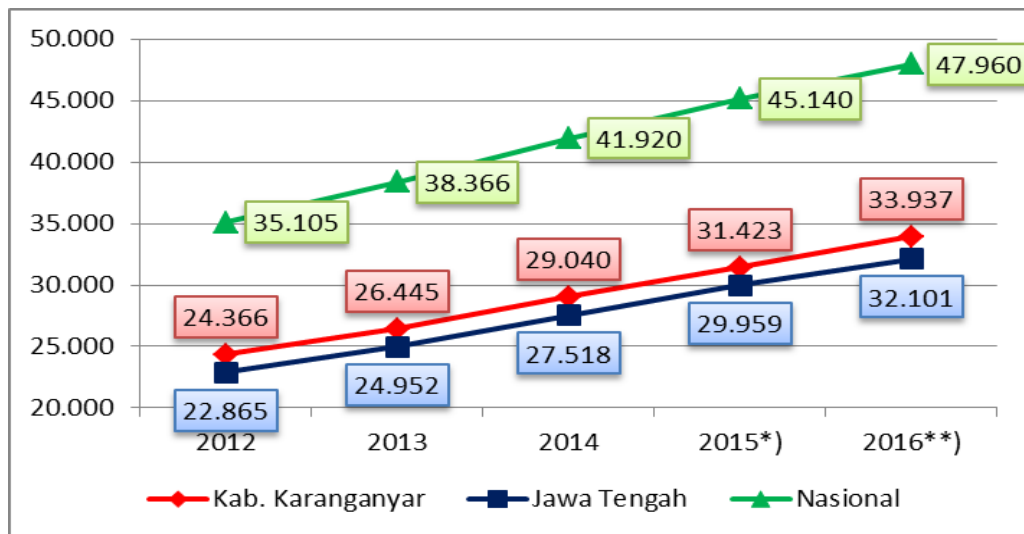
PDRB per kapita adalah nilai PDRB per satu orang penduduk, PDRB perkapita menjadi salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan kinerja yang positif, yaitu terus terjadi peningkatan dari sebesar Rp. 24.366 ribu pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 33.937 ribu pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan kabupaten Karanganyar Tahun 2012-2016 (Milliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	2.642.511,76	2.730.072,24	2.782.404,29	2.944.821,36	3.024.862,36
B	Pertambangan dan Penggalian	219.387,69	231.903,56	234.794,14	237.259,48	245.350,03
C	Industri Pengolahan	8.136.083,92	8.697.102,52	9.249.002,48	9.665.317,37	10.197.089,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	31.779,77	34.555,47	36.200,48	36.928,39	39.238,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16.222,19	16.451,01	16.811,12	16.969,48	17.583,77
F	Konstruksi	1.139.647,38	1.207.316,75	1.254.346,70	1.324.937,03	1.427.437,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.222.453,86	2.320.458,91	2.403.684,68	2.537.865,35	2.691.372,68
H	Transportasi dan Pergudangan	494.057,47	538.422,99	578.918,04	605.619,80	637.927,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	613.493,97	621.177,86	662.676,82	697.279,26	732.397,77
J	Informasi dan Komunikasi	246.608,43	267.136,14	294.101,84	315.512,46	338.040,05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	621.062,77	640.225,09	661.493,15	705.929,31	760.048,58
L	Real Estat	338.995,94	362.298,14	382.272,84	403.183,16	426.366,19
M,N	Jasa Perusahaan	53.287,92	60.034,43	65.212,06	70.905,07	77.414,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	418.808,98	426.438,92	427.694,44	441.204,73	450.205,31
P	Jasa Pendidikan	638.196,72	688.055,98	757.388,08	803.580,33	854.607,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130.410,03	137.768,24	153.152,58	164.531,82	177.628,55
R,S,T,U	Jasa Lainnya	256.447,88	277.098,01	302.290,67	314.442,75	331.233,99
PDRB ADHK		18.219.456,66	19.256.516,28	20.262.444,42	21.286.287,14	22.428.803,80

Sumber: BPS, Kabupaten Karanganyar 2017

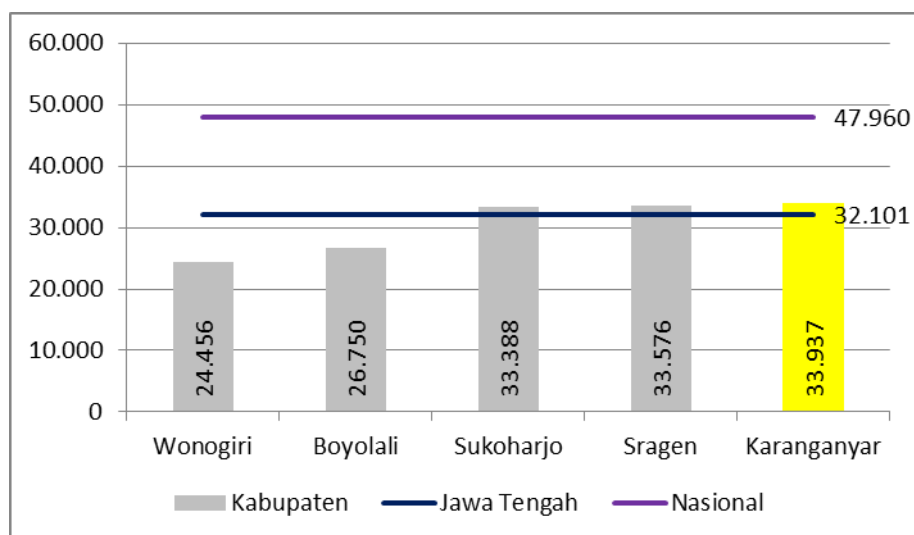
Dibandingkan dengan perkembangan PDRB Per kapita ADHB Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, PDRB Per Kapita Kabupaten Karanganyar relevan atau sama-sama terus mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, secara rinci dapat dilihat pada gambar 3.7.



Sumber : BPS, Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2012 2016

Gambar 3.7 Perkembangan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (Ribu Rupiah)

Perbandingan PDRB Per kapita Kabupaten Karanganyar pada tahun 2016 sebesar Rp.33.397 (ribu) berada di atas Jawa Tengah sebesar Rp.32.101 (ribu) dan di bawah capaian Nasional sebesar Rp.47.960 (ribu). Dibandingkan Kabupaten sekitar di Jawa Tengah pada Tahun 2016, Kabupaten Karanganyar berada diposisi tertinggi. Secara rinci posisi relatif PDRB Per kapita ADHB Kabupaten Karanganyar tahun 2016 dapat dilihat pada gambar 3.8.

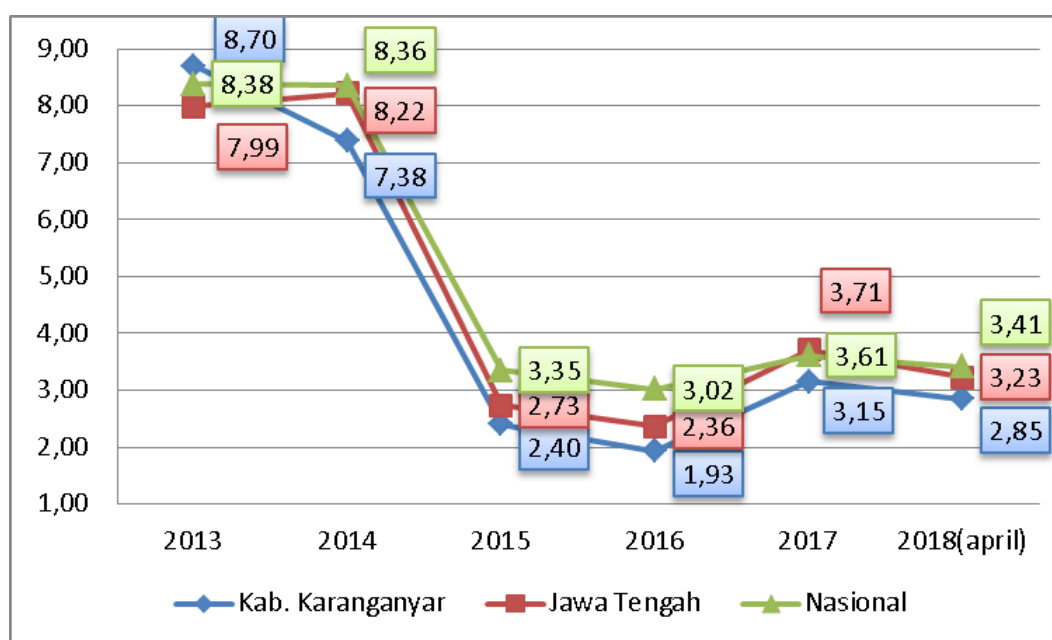


Sumber : BPS, Buku PDRB Kabupaten Kota Di Indonesia 2011-2015, 2016

Gambar 3.8 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 (Ribu Rupiah)

4. Laju Inflasi

Inflasi di Kabupaten Karanganyar mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 (april). Perkembangan laju inflasi Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu lima tahun terakhir, inflasi terendah pada tahun 2016 yang mencapai sebesar 1,93%. Sementara inflasi tertinggi pada tahun 2013 sebesar 8,70%. Perbandingan inflasi Kabupaten Karanganyar dengan Jawa Tengah dan Nasional selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.9.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

***) Angka sangat sementara

Gambar 3.9 Laju Inflasi Kabupaten Karanganyar dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2018 (%)

5. Tantangan dan Prospek Pengembangan Perekonomian Daerah

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 adalah sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi masih kurang optimal, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah.
- Masih rendahnya kualitas tenaga kerja yang memasuki pasar kerja, baik pendidikan dan keterampilan di sektor industri sehingga mengakibatkan daya saing yang rendah di pasar kerja.

- c) Meningkatnya permintaan produk yang berkualitas menuntut peningkatan standar kualitas bagi produk barang dan jasa termasuk hasil industri dari UMKM dan kerajinan.
- d) Belum terpadunya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan .
- e) Belum meratanya sarana dan prasarana pendukung (jalan, jembatan, jaringan irigasi, pemenuhan air baku/ irigasi, sekolah dan sarana kesehatan) yang dapat menunjang perkembangan perekonomian daerah secara merata dan pertumbuhan penanaman modal yang berkualitas.
- f) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik belum optimal dalam rangka pelayanan perizinan penanaman modal, promosi potensi unggulan daerah dan pengembangan pariwisata serta pengembangan "city branding" dalam rangka peningkatan ekonomi kreatif .

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Memperhatikan perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017 dan target capaian dalam RPJMD dan dalam rangka pemanfaatan SILPA Tahun 2017 serta adanya perubahan kebijakan pendapatan daerah terkait dan perubahan regulasi pendapatan daerah maka diperlukan perubahan kerangka keuangan daerah sebagai berikut.

Perubahan kerangka keuangan daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2018 ditunjukkan oleh adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berupa penambahan dan atau pengurangan kegiatan maupun pergeseran pagu indikatif kegiatan. Perubahan ini harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Perubahan Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaan. Berbagai cara meningkatkan pendapatan dilakukan, antara lain :

- 1) Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah :
 - a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, Penambahan gerai-gerai pembayaran dan pembaharuan perangkat

- keras di pos-pos pelayanan Pajak / Retribusi Daerah;
- b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
 - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
 - g. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam lampiran perda pajak dan retribusi daerah;
 - h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
- 2) Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;
 - 3) Meningkatkan kontribusi BUMD / Perusda dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme BUMD / Perusda serta memperkuat BUMD / Perusda;
 - 4) Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
 - 5) Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Secara rinci pendapatan antara penetapan dengan perubahan, dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Perubahan Pendapatan Tahun 2018

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN	2.052.383.160.000	2.120.996.859.264
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	316.266.944.000	331.880.643.264
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	136.000.000.000	150.159.000.000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.112.915.000	22.675.540.309
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.398.553.000	13.783.626.955
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144.755.476.000	145.262.476.000
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.347.443.404.000	1.347.443.404.000

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.500.435.000	36.500.435.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	978.664.650.000	978.664.650.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	332.278.319.000	332.278.319.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	388.672.812.000	441.672.812.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	77.660.600.000	97.660.600.000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	103.533.194.000	136.533.194.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	207.479.018.000	207.479.018.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	

Sumber : BKD, 2018, diolah

2. Perubahan Belanja Daerah

Perubahan Arah kebijakan anggaran belanja Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah dilakukan dengan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dan memenuhi kebutuhan publik;
- 2) Belanja daerah untuk memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
- 3) Penggunaan belanja daerah memperhatikan kemampuan pendapatan daerah serta memperhitungkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan melihat kapasitas serta substansi belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung secara komprehensif;
- 4) Belanja Perangkat Daerah (PD) didasarkan pada standar harga satuan (terutama dalam pengadaan barang dan jasa) melalui analisis berdasarkan pada tingkat inflasi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi beban keuangan daerah. Selain itu dipertimbangkan pula aspek deviasi unit harga satuan dalam setiap tahunnya serta merumuskan arah kebijakan untuk unit harga satuan yang akan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa.
- 5) Belanja daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektif, ekonomis, transparansi, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan yang dicanangkan secara nasional dan provinsi, yang harus diakomodir oleh daerah sebagaimana dengan adanya alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sehingga Perubahan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan kebijakan provinsi dan nasional.

Urusan pemerintahan secara garis besar dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung merupakan refleksi dari anggaran berbasis kinerja yang akan dilaksanakan secara langsung oleh Perangkat Daerah (PD). Belanja langsung PD, harus dipertanggungjawabkan hasilnya oleh PD tersebut. Belanja Tidak Langsung disediakan oleh PD dan dilaksanakan oleh penerima bantuan, hibah atau PD sendiri, sehingga keberhasilan program / kegiatan sangat bergantung pada kerjasama antara PD dan Penerima bantuan atau hibah.

Tabel 3.4. Perubahan Belanja Tahun 2018

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4
2	BELANJA	2.149.427.660.000	2.292.959.916.223
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.452.130.898.000	1.446.761.632.223
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.037.493.921.000	1.028.853.636.223
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	88.344.056.000	91.615.075.000
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	4.625.000.000	4.625.000.000
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.911.292.000	15.911.292.000
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	303.256.629.000	303.256.629.000
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	697.296.762.000	846.198.284.000
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.648.637.100	
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	449.961.633.408	
2 . 2 . 3	Belanja Modal	219.686.491.492	

Sumber : BKD, 2018, diolah

3. Perubahan Pembiayaan Daerah

Perubahan pembiayaan daerah mencakup seluruh tambahan atau pengurangan penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Perubahan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karanganyar dari tahun 2018 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk:

- 1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2017 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- 2) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran

Sedangkan perubahan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (prudential) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Tabel 3.5. Perubahan Pembiayaan Tahun 2018

KODE REK	URAIAN	PENETAPAN	PERUBAHAN
1	2	3	4
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	107.044.500.000	186.963.056.959
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	107.044.500.000	186.963.056.959
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000	15.000.000.000
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	15.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	97.044.500.000	171.963.056.959
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0

Sumber : BKD, 2018, diolah